

Abstrak

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peraturan peninggalan jaman Belanda, oleh karena itu peraturan yang ada tidak sesuai dengan Jati diri Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana asas dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dimana pengertian dari keadilan yang berlaku selama ini adalah tegaknya peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Hukum hanya memperhatikan kepentingan Tersangka, dimana Tersangka dijadikan obyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Negara tanpa memperhatikan kepentingan Korban. Korban tidak memiliki ruang dan kesempatan untuk dapat menuntut haknya yang sudah dirampas secara paksa oleh Tersangka.

Oleh karena itu, diperlukan adanya rekonstruksi di bidang penyidikan, dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data Primer dan data Sekunder yang diambilkan dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk menganalisis hukum positif yang ada saat ini dan dibandingkan dengan budaya masyarakat sehingga dapat diperoleh suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jati diri bangsa.

Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan memasukkan mekanisme *Restorative Justice* dengan cara mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian masalah di luar peradilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Korban yang dirampas oleh Tersangka, terutamanya terhadap kejahatan harta benda dimana kerugian yang dialami Korban adalah kerugian harta benda sehingga Korban dapat menuntut kerugian yang ditimbulkan dan Tersangka memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian materiil yang ditimbulkan tanpa harus melanjutkan proses perkara ke Pengadilan. Oleh karena itu, Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan atas dasar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dan surat pencabutan laporan sehingga asas hukum dapat tercapai, yaitu keadilan bagi Korban maupun Tersangka, Hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga mendatangkan manfaat dan terwujud kepastian hukum karena hasil dari penghentian penyidikan tersebut dapat dimintakan penetapan yang kemudian harus dijalankan oleh kedua pihak.

Kata kunci : penghentian penyidikan, delik harta benda, keadilan bermartabat

Abstract

The applicable legislation that is relic are the dutch era. So that reason, existing regulations are not in accordance with the Indonesian National Identity based on Pancasila. As the principle of laws justice, expediency, and the legal certainty, where the meaning of justice means the establishment of laws and regulations as appropriate. Law only concerns the interests of the suspect, where the suspect is made a legal object who must account for his actions before the State regardless of the interests of the victim. Victims do not have space and opportunity to demanding his rights that had been forcibly confiscated by the Suspect.

So that reason, it need the reconstruction in the field of investigation, with sociological juridical research methods with Primary data sources and Secondary data taken from the existing legislation to analyze the positive law that exists and compared to the culture of society so that a law can be obtained which is in accordance with national identity.

The reconstruction be done by include the Restorative Justice mechanism by means of mediation as one method of solving problems outside the court. This aims to protect the interests of victims who was seized by the suspect, especially against property crime where the loss suffered by victims is loss of property so the victim can sue for losses and Suspects have the obligation to replace material losses caused without having to proceed with the court proceedings. So that reason, the Investigators can stop the investigation based on the basis of a Joint Agreement Letter (SKB) and a report revocation letter so that the legal principle can be achieved, namely justice for victims and suspects, Law can run according to its function bring benefits and realize legal certainty because the result of the termination of the investigation stipulations can be requested which must then be carried out by both parties.

Key Words: termination of investigation, delinquency of property, dignified justice

